

STRATEGI PENANGANAN PENGANGGURAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

(Studi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng)

Rhismayanti¹ Andi Tenripadang² Ilham Laman³

^{1 2 3} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: chimongkuy1411@gmail.com¹

Abstract

This study aims to determine the reality of unemployment and the role of the Regional Government in dealing with unemployment in Soppeng Regency. The research method used is field qualitative through empirical and syar'i juridical approaches. The results of this study indicate that the unemployment rate in Soppeng Regency from 2019 to 2021 has increased due to uncertain macroeconomic conditions, so that the labor recruitment process is not optimal. The Soppeng Regency Manpower Office has made several efforts to reduce the unemployment rate, such as increasing equity in the placement of workers through work connectivity, expanding job opportunities, as well as training and workforce productivity. The handling carried out by the Manpower Office in the Siyasa Syar'iiyah concept is in accordance with the siyasah rules regarding the importance of maintaining the trust and benefit of the community so that it avoids harm as explained in QS. Al-Mu'minun verse 8, An-Nisa verse 58 and hadith.

Keywords: Local Government; Siyasa Syar'iiyah; Unemployment

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realitas pengangguran serta peran Pemerintah Daerah dalam menangani Pengangguran di Kabupaten Soppeng. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif lapangan melalui pendekatan yuridis empiris dan syar'i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng dari 2019 sampai 2021 mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kondisi ekonomi makro yang tidak menentu, sehingga proses perekrutan tenaga kerja tidak maksimal. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka pengangguran, seperti meningkatkan pemerataan penempatan tenaga kerja melalui konektivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, serta pelatihan dan produktifitas tenaga kerja. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas tenaga kerja dalam konsep Siyasa Syar'iiyah telah sesuai dengan kaidah siyasah tentang pentingnya menjaga amanah dan kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari kemudharatan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minun ayat 8, An-Nisa ayat 58 dan hadis.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Pengangguran; Siyasa Syar'iiyah.

Rhismayanti, Andi Tenripadang, Ilham Laman, "Strategi Penanganan Pengangguran dalam Perspektif Siyasa Syar'iiyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariah* 5, no. 2 (2024): 371-382.

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk yang sangat pesat di Indonesia serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan potensi dan sumber daya sosial yang ada sangat mempengaruhi angka pengangguran. Pengangguran menjadi suatu permasalahan jangka pendek suatu negara.² Ini pasti telah menjadi masalah yang sangat patut dicontoh bagi negara-negara berkembang, terlepas dari perkembangan populasi yang memadai selanjutnya, terus berkembang secara konsisten. Pengangguran adalah masalah penting yang dilihat oleh negara-negara non-industri. Persoalan-persoalan tersebut tentu membutuhkan peran pemerintah dalam mengatasinya.³ Pada tingkat dasar, interaksi perbaikan ini diharapkan dapat bekerja pada bantuan pemerintah daerah setempat.⁴

Tingkat pengangguran juga dapat dipengaruhi oleh perkembangan moneter. Dimana, ketika perkembangan keuangan meningkat, itu menyiratkan bahwa keadaan kerja suatu organisasi juga meningkat baik dalam internal pemerintahan maupun dikalangan masyarakat.⁵ Ketika tugas bertambah, itu berarti organisasi membutuhkan banyak pasokan tenaga kerja, yang dapat membuka pintu bagi pekerja di sekitarnya untuk mencari pekerjaan guna mengurangi pengangguran. Dengan asumsi perkembangan keuangan menurun, itu akan mempengaruhi keadaan organisasi dalam tugas dan latihannya akan berkurang sehingga pintu terbuka potensi kerja akan berkurang dan memperluas tingkat pengangguran. Keamanan moneter yang diinginkan oleh setiap negara sebagian besar dicirikan sebagai kondisi keuangan di mana tidak ada pengangguran yang serius. Pengangguran dapat mempengaruhi perekonomian bangsa, khususnya pengurangan upah per kapita, berkurangnya pendapatan pemerintah dari daerah bea, perluasan biaya ramah yang seharusnya ditimbulkan oleh otoritas publik, dan

¹ Alda Amadiarti Salam dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 244-260.

² Indayani, S., dan Hartono, B. "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19." *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020): 201-208.

³ Ayu Qonitah dkk. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasa Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 333-345.

⁴ Sukirno, S. *Makroekonomi : Teori Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

⁵ Ariansyah dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri AD INTERIM dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasa Syar'iyah)." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 13-24.

dapat membangun kewajiban negara.⁶ Pada dasarnya, penegasan hak atas pekerjaan dan pekerjaan di satu sisi merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi permasalahan yang muncul di pasar tenaga kerja secara umum.⁷

Realitas angka pengangguran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2017 mencapai 2.847 orang. Setelah memasuki tahun 2018 jumlah pengangguran meningkat menjadi 2.940 orang. Memasuki tahun 2019 masih ada penambahan 3536 orang, hingga tahun 2020 bertambah 4630 orang, jumlah pengangguran di Kabupaten Soppeng.⁸

Realitas pengangguran yang terjadi di Kabupaten Soppeng menyebabkan angka pengangguran terus meningkat karena kondisi makro ekonomi yang dipertanyakan di kabupaten, khususnya Soppeng sehingga perusahaan tidak dapat memperluas usahanya di Soppeng sehingga proses pendaftaran kerja tidak ideal. Dalam menangani pengangguran di Kabupaten Soppeng, Pemerintah Daerah Soppeng melakukan beberapa strategi yang diharapkan dapat menurunkan angka pengangguran dan mendapatkan posisi yang baik sesuai dengan kemampuannya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng sebagai landasan administrasi berperan penting dalam melakukan salah satu kemampuan di bidang penyediaan tenaga kerja. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Soppeng ialah dengan meningkatkan pemerataan penempatan tenaga kerja dengan membentuk jejaring konektivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pelatihan & produktifitas tenaga kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) deskriptif kualitatif.⁹ Kemudian, pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris serta pendekatan syar'i. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder serta data tersier yang sifatnya melengkapi sumber data

⁶ Abdul Khakim. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014): 3.

⁷ Nurul Pratiwi dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021): 745-758.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. *Kabupaten Soppeng dalam angka 2017-2021*. (Soppeng: BPS, 2021).

⁹ Kusnadi Umar dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petitum* 9, no. 1 (2020): 78-87.

primer dan data sekunder.¹⁰ Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi kemudian dianalisis memakai teknik analisis data secara kualitatif serta selanjutnya dilakukan pengolahan data secara naratif analisis dengan menggambarkan secara lengkap tentang masalah-duduk perkara sesuai penelitian lapangan ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Pengangguran di Kabupaten Soppeng

Konsep restoratif justice merupakan suatu cara penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku secara bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk membicarakan solusi yang berujung pada perdamaian.¹⁷ Konsep Restoratif Justice dalam mewujudkan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat menghemat anggaran. Proses Restoratif Justice dimungkinkan dari tingkat masyarakat hingga sistem peradilan pidana di lingkungan Pasca putusan (Lembaga Masyarakat). Proses tersebut melibatkan fasilitator Restoratif Justice, korban, pelaku, dan anggota masyarakat yang memfasilitasi dan memungkinkan proses tersebut. Semua proses dilaksanakan atas persetujuan para pihak. Menurut tokoh masyarakat.

Pengangguran adalah masalah tinggi yang menyebabkan upah rendah yang memicu munculnya kemiskinan. Pengangguran adalah beban dalam perekonomian dan merupakan kekhawatiran bagi otoritas publik. Jumlah pengangguran di Kabupaten Soppeng selama tahun 2019 sampai 2021 dapat dilihat dari tabel 4.1.

Tabel 4.1 Jumlah Pengangguran di Kabupaten Soppeng

Tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Pengangguran (Ribu Jiwa)
1.	2019	3536

¹⁰ Abdul Rinaldi Muis dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 261-275.

¹⁷ Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justice*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012): 180.

2.	2020	4630
3.	2021	4269
Jumlah		12. 435

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng¹¹

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Soppeng dari tahun 2019 mencapai 3536 jiwa. Setelah memasuki tahun 2020 jumlah pengangguran mengalami kenaikan mencapai 4630 jiwa. Masuk pada tahun 2021 jumlah pengangguran mengalami penurunan dengan jumlah 4269 jiwa tetapi dengan jumlah tersebut itu masih berada pada tahap jumlah pengangguran yang masih banyak di wilayah Kabupaten Soppeng.

Variabel yang menyebabkan angka pengangguran terus meningkat adalah karena kondisi makro ekonomi yang dipertanyakan di kabupaten, khususnya Soppeng, sehingga organisasi tidak dapat mengembangkan usahanya di Soppeng sehingga proses pendaftaran kerja tidak ideal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanaruddin sebagai Kabid Tenaga Kerja mengenai realitas pengangguran yang terjadi di Kabupaten Soppeng dengan mengatakan bahwa:

“Pada saat itu, para pengangguran terus mencari pekerjaan, yaitu 200-700 orang per tahun. Dengan asumsi itu terus bertambah karena tidak ada laporan penempatan, biasanya hampir 3000, 4000.”¹²

Dalam realita pengangguran yang terjadi di Kabupaten Soppeng, adapun pengangguran terdidik yang sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Melly Warni, yang belum memiliki pekerjaan mengatakan:

“Memang, jika Anda mendapatkan beberapa informasi tentang Realita pengangguran saat ini, miris melihatnya, sulit bagi kita yang berkonsentrasi di perkuliahan untuk menemukan jalur pekerjaan baru, itu sulit. Sudah cukup lama kita menyelesaikan kuliah namun belum memuaskan harapan kita. Memang, sekarang banyak lulusan sarjana, tampaknya masing-masing dari mereka mungkin berjuang

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. *Kabupaten Soppeng dalam angka 2019-2021*. (Soppeng: BPS, 2019-2021).

¹² Kanaruddin, Kabid Tenaga Kerja, wawancara, Kabupaten Soppeng, 13 Juli 2022.

untuk menemukan bidang pekerjaan baru. Memang, saya pernah frustrasi juga, saya dulu merasa tidak akan sulit untuk menemukan jalur pekerjaan baru pada saat masih kuliah, pada kenyataannya seperti saat ini. Saya tidak tahu apa yang membuatnya begitu susah. Sebenarnya, jika kita melamar pekerjaan menggunakan ijazah sarjana, itu lebih terhormat, tetapi sebenarnya tidak demikian.”¹³

Lulusan Perguruan Tinggi tidak bisa dibedakan dengan kecurigaan seseorang yang tidak sulit mencari bidang pekerjaan baru, cemerlang, lebih mudah ditata, memiliki gaji besar, dan lain sebagainya. Anggapan yang sudah mati, namun dengan asumsi bahwa Anda melihat kebenaran di lapangan hari ini, gelar yang diperoleh dari hasil studi di tingkat perguruan tinggi juga tidak seindah yang dibayangkan dari kecurigaan beberapa penilaian umum terhadap sarjana lulusan. Dengan mengenyam pendidikan perguruan tinggi seorang sarjana, kepedulian hidup tidak sampai disitu saja, karena apa yang kini menjadi aib masyarakat tanpa disadari akan menjadi masalah alumni atau acuan untuk maju terus dari sekarang. Isu yang muncul ketika seseorang menjadi alumni adalah mencari tugas. Sesuatu yang menjadi tujuan mendasar dan diselesaikan oleh seorang alumni.

Berkenaan latar belakang kondisi tersebut, menuntut peran aktif pemerintah (pusat dan daerah) untuk segera mungkin menetapkan kebijakan yang bersifat strategis dalam mencari dan menemukan cara yang lebih efektif yang diharapkan dapat menjamin kepastian.¹⁴

2. Peran Pemerintah Daerah Soppeng dalam Menangani Pengangguran Kabupaten Soppeng

Persoalan pengangguran biasanya ditimbulkan oleh ketidakcukupan lapangan kerja dalam memenuhi permintaan kerja. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, pemerintah sangat memperhatikan perlindungan kerja dan keselamatan kerja, tentunya tujuan pemerintah dalam hal ini selain benar-benar untuk melindungi dan memperhatikan keselamatan kerja dan para pekerja yang umumnya lemah.¹⁵ Aspirasi setiap kelompok masyarakat mendapatkan ruang dan diakomodasi oleh pemerintah.¹⁶ Sehingga terbukanya peluang yang luas bagi masyarakat untuk mengembangkan kinerjanya.¹⁷

¹³ Melly Warni, Masyarakat, wawancara, Batu-Batu Kel. Manorang Salo Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, 16 Juli 2022.

¹⁴ Ryan Rahman Ronaldo dkk. “Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Di UD. Bumi Rahayu Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 85-95.

¹⁵ Muh. Aqil Fatahillah dan Andi Tenri Padang. “Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 402-413.

¹⁶ Abdul Syatar dkk. “Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah Di Bulukumba.” *Bilancia* 15, no. 1 (2021): 65-84.

¹⁷ Indo Esse dan Lomba Sultan. “Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021): 88-101.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng sebagai organisasi pemerintahan memegang peranan penting dalam menyelesaikan kapasitas seseorang di bidang pekerjaan. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Soppeng ialah dengan meningkatkan pemerataan penempatan tenaga kerja dengan membentuk jejaring konektivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pelatihan & produktifitas tenaga kerja dengan tujuan definitif mengurangi pengangguran. Hal tersebut didasari dengan maksud pemerintah dalam hal Dinas Tenaga Kerja yang dijalankan itu dapat disaksikan oleh seluruh masyarakat setempat.¹⁸

1. Penempatan Tenaga Kerja

Model penempatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng yaitu dengan mencarikan para tenaga kerja lapangan kerja agar bisa mendapatkan pekerjaan. Berdasarkan informasi yang didapat di lapangan, maka peneliti melakukan wawancara langsung di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Soppeng terkait dengan penempatan tenaga kerja kepada Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Marhawiah yang mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan kewajiban dan kemampuan mendasarnya, misalnya di bidang ketenagakerjaan, kami telah menyiapkan tempat bagi pencari kerja yang akan mendaftar sebagai pencari pekerjaan di kantor Disnakertrans. Ruangan itu berada di lantai utama di wilayah kerja. Juga, pertanyaan tentang penempatan tenaga kerja tergantung pada jumlah pencari kerja, terlepas dari apakah ada pencari kerja yang memenuhi standar dan tidak ada jumlah individu yang perlu mencari pekerjaan. Kami mengakui semua pencari pekerjaan, kami layani dan nanti kami akan mengubahnya sesuai jumlah perusahaan yang bekerja sama dengan Disnakertrans.”¹⁹

Sesuai hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti bisa melihat bahwa bidang penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja telah menyelesaikan kewajiban dan kemampuannya serta pedoman yang dibuat oleh Disnakertrans itu sendiri berjalan dengan baik. Pendetang banyak yang senang dengan apa yang dilakukan oleh Disnaker sehingga Disnaker Kabupaten Soppeng mendapatkan sertifikat bantuan terbuka yang baik bagi pencari kerja.

¹⁸ Budiasri dkk. “Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasa Syar’iyyah.” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 25-39.

¹⁹ Marhawiah, Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, *wawancara*, Kabupaten Soppeng, 14 Juli 2022.

2. Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja merupakan tindakan yang dilakukan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja itu sendiri. Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab atas jumlah pengangguran di Kabupaten Soppeng dengan memiliki proyek-proyek luar biasa dalam menangani pengangguran khususnya dalam masalah perluasan kesempatan kerja.

Mengenai perluasan kesempatan kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Soppeng, peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terkait perluasan kesempatan kerja bagi para pihak penganggur, Marhawiah yang mengatakan bahwa:

“Mengenai perluasan kesempatan kerja bagi kelompok pengangguran yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja sebagai pengembangan tandan usaha berupa pembentukan kelompok usaha melalui perluasan kesempatan kerja sistem padat karya dengan sasarannya yaitu penganggur dan setengah penganggur kemudian ada fasilitas kelompok kerja produktif buruh informal yang dengan sasarannya yaitu penganggur, setengah penganggur, pencari kerja dan buruh informal yang berminat merintis usaha secara kelompok. Selain itu, tugas-tugas yang kita selesaikan tidak akan berhasil dengan asumsi tidak ada bantuan dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat juga berperan penting dalam mengurangi pengangguran.”²⁰

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, maka dapat dimaklumi bagaimana reaksi individu-individu yang begitu senang dengan perluasan kesempatan kerja yang diselesaikan oleh Disnaker. Latihan-latihan ini dapat membantu perekonomian individu di Kabupaten Soppeng, baik di wilayah provinsi, kecamatan, maupun kota metropolitan.

3. Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja sendiri merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki keistimewaan dalam membuat kebijaksanaan serta pengambilan keputusan²¹ untuk menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja bagi calon-calon para tenaga kerja yang ada di Kabupaten Soppeng. Dalam melakukan pelatihan bagi tenaga kerja, Disnaker

²⁰ Marhawiah, Kasi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, wawancara, Kabupaten Soppeng, 14 Juli 2022.

²¹ Usman Jafar. *Fiqh Siyasah Telaah atas Ajaran Sejarah dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. (Makassar: Alauddin University Press, 2013): 45.

menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja berbasis keterampilan untuk masyarakat yang juga didukung penuh oleh seluruh komponen masyarakat.²²

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, Sunarti terkait pelatihan tenaga kerja yang berbasis keterampilan terhadap masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Penyiapan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja merupakan salah satu bentuk bantuan dari otoritas publik untuk daerah setempat. Di sini, individu yang tidak tahan, tidak tamat SMA, dll dipersiapkan untuk memiliki kemampuan atau penguasaan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.”²³

Motivasi yang melatarbelakangi pelatihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Soppeng adalah untuk membangun efisiensi, kemampuan, dan sifat tenaga kerja di Kabupaten Soppeng untuk mengurangi pengangguran dan lebih mengembangkan bantuan pemerintah daerah dengan kemampuan yang diberikan dan hal tersebut dipercaya bahwa setelah pelatihan selesai, masyarakat dapat bekerja atau memulai bisnis sendiri. Untuk situasi ini, banyak perusahaan melakukan sosialisasi kepada masyarakat²⁴ mengenai pentingnya calon karyawan yang saat ini memiliki kemampuan khusus. Untuk meningkatkan efisiensi, kemampuan, dan sifat angkatan kerja, hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan tenaga kerja berbasis kemampuan kepada pencari kerja.

3. Perspektif Siyasah Syar’iyyah terkait Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Pengangguran di Kabupaten Soppeng

Strategi Pemerintah Daerah dalam penanganan pengangguran di Kabupaten Soppeng sesuai dengan tugas-tugas kenegaraan yang diatur dalam *Siyasah Syar’iyyah* tentang tugas dan wewenang lembaga pemerintahan pusat dalam hal ini pemimpin negara yaitu mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan salah satunya adalah Dinas Tenaga Kerja.

Dinas tenaga kerja dalam hal ini pejabat-pejabat yang ada didalamnya harus menjalankan tugas dan mengemban amanat yang telah diberikan kepadanya. Seperti yang tertulis dalam QS. Al-Mu’minun ayat 8.

²² Sitti Hardianti dkk. “Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar’iyyah).” *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 108-120.

²³ Sunarti, Kasi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, wawancara, Kabupaten Soppeng, 14 Juli 2022.

²⁴ Haris Munandar dan Adriana Mustafa. “Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A’Massa.” *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021): 359-370.

Terjemahnya:

“Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”²⁵

Dapat disimpulkan bahwa seorang pejabat pemerintahan, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus senantiasa menjalankan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan kepadanya.

Pemerintah Daerah seperti halnya Dinas Tenaga Kerja dalam menetapkan kebijakan dan pelaksanaan program kegiatannya harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat. Dan diharapkan kebijakan yang dikeluarkan itu dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh warga masyarakat. Seperti dalam QS. An-Nisa ayat 58.

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyaku kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”²⁶

Selain Al-Qur’an dan hadist, adapula kaidah siyasah yang menerangkan tentang pentingnya menjaga amanah dan kemaslahatan rakyat.

Terjemahnya:

“khiyanah itu tidak dapat dibagi-bagi.”

Maksud dari kaidah di atas adalah, apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap suatu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecah dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya.

Terjemahnya:

“Kemudharatan harus dihilangkan.”

Berdasarkan kaidah diatas bahwa yang mengakibatkan kemudharatan bagi rakyat harus dihilangkan, dalam hal ini pengangguran terutama yang berasal dari Kabupaten Soppeng yang belum mendapatkan pekerjaan dan sementara mencari pekerjaan. Maka dari itu, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja harus membuat kebijakan

²⁵ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012): 113.

²⁶ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. (Bandung: Syaamil Qur’an, 2012): 87.

untuk menghilangkan paling tidak mengurangi pengangguran yang tidak diinginkan agar terciptanya kemaslahatan.

KESIMPULAN

Realita Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Soppeng menyebabkan angka pengangguran terus meningkat karena kondisi makro ekonomi yang dipertanyakan di kabupaten, khususnya Soppeng sehingga organisasi tidak dapat memperluas usahanya di Soppeng sehingga proses pendaftaran kerja tidak ideal. Peran Dinas Tenaga Kerja dalam menangani pengangguran di Kabupaten Soppeng ialah dengan meningkatkan pemerataan penempatan tenaga kerja dengan membentuk jejaring konektivitas kerja, perluasan kesempatan kerja, dan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Dalam konteks siyasah syar'iyah segala kebijakan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dan segala yang berpotensi menimbulkan mudarat harus di jauhi dan dihindari. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas tenaga kerja dalam konsep Siyasah Syar'iyah telah sesuai dengan kaidah siyasah tentang pentingnya menjaga amanah dan kemaslahatan masyarakat agar terhindar dari kemudharatan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mu'minin ayat 8, An-Nisa ayat 58 dan hadis.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Ariansyah dan Usman Jafar. "Kedudukan Menteri AD INTERIM Dalam Sistem Pemerintahan (Telaah Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Budiasri dkk. "Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garanta Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Esse, Indo dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo Di Desa Tosara Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Fatahillah, Muh. Aqil dan Andi Tenri Padang. "Analisis Tentang Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Hardianti, Sitti dkk. "Efektivitas Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pelestarian Cagar Budaya (Telaah Siyasah Syar'iyah)." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- Muis, Abdul Rinaldi dkk. "Analisis Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Munandar, Haris dan Adriana Mustafa. "Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Dalam Meminimalisasi Tindakan A'Massa." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Pratiwi, Nurul dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Di Tengah Pandemi Covid-19." *Siyasatuna* 2, no. 3 (2021).
- Qonitah, Ayu dkk. "Peran Pemerintah Daerah Terhadap Aktivitas Penambangan Di Desa Pakkasalo Kabupaten Bone Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).

- Ronaldo, Ryan Rahman dkk. "Sistem Pengupahan Terhadap Buruh Di UD. Bumi Rahayu Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022).
- S., Indayani dan Hartono, B. "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19." *Perspektif: Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18, no. 2 (2020).
- Salam, Alda Amadiarti dkk. "Studi Kritis Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Syatar, Abdul dkk. "Formalisasi Hukum Islam Dalam Bentuk Peraturan Daerah: Analisis Yuridis Peraturan Daerah Syariah Di Bulukumba." *Bilancia* 15, no. 1 (2021).
- Umar, Kusnadi dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petitum* 9, no. 1 (2020).

Buku

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2017-2021*. Soppeng: BPS, 2021.
- Jafar, Usman. *Fiqh Siyasah Telaah Atas Ajaran Sejarah Dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syaamil Qur'an, 2012.
- Khakim, Abdul. *Pengantar hukum ketenagakerjaan indonesia berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- S, Sukirno. *Makroekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng. *Kabupaten Soppeng dalam Angka 2017-2021*. Soppeng: BPS, 2021.

Wawancara

- Kanaruddin, Kabid Tenaga Kerja, *wawancara*, Kabupaten Soppeng, 13 Juli 2022.
- Marhawiah, kasi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, *wawancara*, kabupaten soppeng, 14 Juli 2022.
- Sunarti, kasi pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, *wawancara*, kabupaten soppeng, 14 Juli 2022.
- Warni, Melly, Masyarakat, *wawancara*, Batu-Batu Kel. Manorang Salo Kec. Marioriawa Kab. Soppeng, 16 Juli 2022.